



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

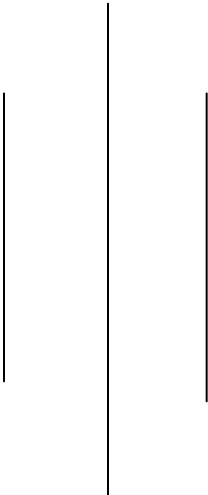
2026



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**



RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah kemudian dapat dijadikan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026.**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2026 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen ini sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat Renja, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan program di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam menyusun prioritas-prioritas program dan kegiatan pada Tahun 2024, sehingga sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai sesuai target perencanaan.

Penyusunan Renja merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah. Renja Setda pada Tahun 2025 menggunakan dokumen Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Kebumen yang sejahtera dan lebih baik.

Kebumen, 30 Juli 2025
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen,



Edi Rianto, ST., MT.

Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19701101 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABELiii

DAFTAR LAMPIRANiv

BAB I PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang.....1

 B. Landasan Hukum.....2

 C. Maksud dan Tujuan3

 D. Sistematika Penulisan4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 20245

 A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah5

 B. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....16

 C. Capaian Keuangan22

 D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen26

 E. Review Terhadap Rancangan Awal RENJA Pemerintah Daerah30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....54

 A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi.....54

 B. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen55

 C. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen56

 D. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026.....56

 E. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026.....62

BAB IV66

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH66

 A. Prioritas Sekretariat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten...66

 B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....67

BAB V PENUTUP.....77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 :	Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	6
Tabel 2.2 :	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d tahun 2024	11
Tabel 2.3 :	Pencapaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	17
Tabel 2.4 :	Pencapaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	19
Tabel 2.5 :	Rincian Urusan Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Tahun 2024	21
Tabel 2.6 :	Anggaran dan Realisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	22
Tabel 2.7 :	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	31
Tabel 3.1 :	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kebumen	55
Tabel 3.2 :	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2025 - 2029	58
Tabel 3.3 :	Indikator Program Sekretariat Daerah Tahun 2025 - 2029	61
Tabel 3.4 :	Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026	63
Tabel 4.1 :	Program Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026	66
Tabel 4.2 :	Program dan Kegiatan Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Anggaran 2025 SEKRETARIAT DAERAH
- Lampiran 2: Berita Acara Forum Perangkat Daerah 2025 beserta lampirannya.
- Lampiran 3: Daftar Hadir Forum Perangkat Daerah 2025
- Lampiran 4: Notulen Forum Perangkat Daerah 2025
- Lampiran 5: Dokumentasi Pelaksanaan Forum Perangkat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004) yang kemudian dijelaskan dengan lebih terperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang lebih memantapkan kedudukan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia menjadi semakin kuat. Dengan adanya peraturan tersebut, maka penyusunan perencanaan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari dan apabila hal ini tidak dilakukan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Keluarnya aturan tersebut, juga menimbulkan perubahan yang cukup signifikan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Indonesia. Perubahan tersebut antara lain adalah: Pertama, menyangkut dengan jenis dokumen pembangunan daerah yang harus dibuat oleh masing-masing daerah sesuai dengan perkembangan demokratisasi dalam system pemerintahan daerah. Kedua, sesuai dengan perubahan jenis dokumen yang perlu dibuat, maka teknis penyusunan rencana juga mengalami perubahan yang cukup mendasar. Ketiga, tahapan penyusunan rencana juga mengalami perubahan untuk menerapkan Sistem Perencanaan Partisipatif guna meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sebagai usaha yang sistematis, maka pembangunan daerah harus dimulai melalui proses perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah pada hakekatnya mempunyai peranan yang sangat besar sebagai alat untuk mendorong dan mengendalikan proses pembangunan daerah secara lebih tepat dan terarah. Juga disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Agar dalam implementasinya perencanaan pembangunan pada tingkat level Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik, maka harus ada dokumen pendukungnya setiap tahunnya. Dokumen yang dimaksud adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya

disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Memperhatikan hal tersebut, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki arti yang sangat strategis bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu keniscayaan, tidak terkecuali penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, landasan hukum yang digunakan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyelaraskan prioritas program dan kegiatan Sekretariat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun tujuan penyusunan Renja meliputi :

1. Sinkronisasi terhadap program-program dalam Renja Perangkat Daerah dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan.

- 2. Menjabarkan pelaksanaan yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 khususnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
- 3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan sebagai tindaklanjut dari permasalahan yang terjadi di tahun sebelumnya sebagai antisipasi terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang.
- 4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan untuk menyamakan persepsi, komitmen dan langkah-langkah kebijakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
- 5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah, provinsi maupun nasional.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I.	PENDAHULUAN
	Terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
BAB II.	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024
	Berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah, Capaian Keuangan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	Terdiri dari Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen, Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V.	PENUTUP
LAMPIRAN	- Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Daerah
.	- Berita Acara Forum Perangkat Daerah Tahun 2025
	- Daftar Hadir Forum Perangkat Daerah Tahun 2025
	- Notulen Forum Perangkat Daerah Tahun 2025
	- Foto Kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Kegiatan review hasil pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Sekretariat Daerah Tahun 2024. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedang output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. *Outcome* atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 pada dasarnya mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan atau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023. Didalam review ini secara jelas tergambar terkait realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Tahun 2024 menjalankan 3 Program , 18 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2024

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				4	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
				9	Penyediaan Bahan/Material
				10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	11	Pengadaan Mebel
				12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				13	Pengadaan Sarana dan Prasarana

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
			Daerah		Gedung Kantaor atau Bangunan Lainnya
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				19	Pemeliharaan Mebel
				20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				21	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		7	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				23	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				24	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				25	Penyediaan Dana

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
					Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		8	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	26	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
				27	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
		9	Penataan Organisasi	28	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
				29	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
				30	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	31	Fasilitasi Keprotokolan
				32	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
				33	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
		2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	11	Administrasi Tata Pemerintahan
35	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				
36	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				
12	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			37	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
				38	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
					Kesejahteraan Sosial
				39	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
		13	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	40	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
				41	Fasilitasi Bantuan Hukum
				42	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
		14	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	43	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	15	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	44	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
				45	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
		16	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	46	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
				47	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
		17	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	48	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
				49	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
				50	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		18	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	51	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
				52	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
				53	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Realisasi dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11	12 =(11/4)
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kualitas Kebijakan	70,00	NA	67,84	NA	NA	NA	70,00	70,00	100
		Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Anggaran	229	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas	87	NA	NA	NA	NA	NA	87	87	100
		Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Pendampingan	123	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan yang	5	5	11	3	11	366,67	5	5	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11	12 =(11/4)
		Disusun Tepat Waktu									
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Sesuai dengan Ketentuan	16	NA	NA	NA	NA	NA	16	16	100
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	83,33	NA	NA	NA	NA	NA	83,33	83,33	100
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah yang Disepakati	5	NA	NA	NA	NA	NA	5	5	100
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71	70,13	70,15	72,60	72,60	100	71,70	71,70	102,43
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90,4	86,53	89,57	85	90,40	106,35	85,50	85,50	94,58
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disediakan Tepat Waktu	12	12	12	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11	12 =(11/4)
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	12	12	12	12	100	12	12	100
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	12	12	12	100	12	12	100
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	NA	NA	NA	NA	NA	12	12	100
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	12	12	100	12	12	100
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127	127	127	127	127	100	126	126	99,21
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Dan Operasional KDH Dan WKDH	12	12	12	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11	12 =(11/4)
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitasi Kerumahtangga Sekretariat Daerah	12	12	12	12	12	100	12	12	100
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan Organisasi	3	4	4	4	4	100	3	3	100
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaian Layanan Fasilitasi Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	8	NA	NA	NA	NA	NA	8	8	100
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan	84,37	36,90	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang Sesuai Ketentuan	3	NA	NA	NA	NA	NA	3	3	100
		Return on Aset (ROA) BUMD	4,09	NA	NA	NA	NA	NA	4,59	4,59	112,22
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengendalian Pembangunan Dan	2	2	2	2	2	100	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11	12 =(11/4)
		Laporan Pelaksanaan Pembangunan									
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Layanan Pengadaan	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	100
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Capaian Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang Sesuai Ketentuan	3	NA	NA	NA	NA	NA	3	3	100

B. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sementara itu Fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pengoordinasian proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah
5. Pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi tata laksana, hubungan masyarakat dan protokol
6. Pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas perangkat daerah
7. Pelaksanaan administrative dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lai yang diberikan oleh Bupati dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029

No	Indikator	IKK	Target Renstra Setda				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan										
	Nilai EKPPD	Nilai	2,95	3,28	3,29	3,31	3,27	NA	3,29	3,31	
	Indeks Fasilitas Keagamaan	Indeks	NA	NA	6,05	6,26	NA	NA	6,05	6,26	
	Sasaran 1										
	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	72	75	75	78	98,52	NA	75	78	
	Indeks Zakat Nasional	Indeks	NA	0,56	0,59	0,62	0,53	NA	0,59	0,62	
	Capaian Penerapan SPM Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Sasaran 2										
	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	Indeks	89,00	90,40	90,70	91,00	96,59	76,51*	90,70	91,00	
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	NA	3,94	4,08	4,22	NA	NA	4,08	4,22	
	Sasaran 3										
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	90,77	90,40	90,45	90,40	89,33	90,40	90,45	
	Sasaran 4										
	Persentase Pesantren dan Pendidikan	%	NA	NA	6,8	9,11	NA	NA	6,8	9,11	

	Keagamaan yang mendapat fasilitas legalitas kelembagaan										
	Sasaran 5										
	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas peningkatan kapasitas	%	NA	5,44	5,05	4,74	NA	NA	5,05	4,74	
	Sasaran 6										
	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitas sarana prasarana	%	NA	NA	13,29	15,51	NA	NA	13,29	15,51	

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2029

No	Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator	Target Tahun ke-		Realisasi Tahun ke-		Ket
			2025	2026	2025	2026	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,70	71,00	71,70	NA	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	85,50	90,40	90,65*	NA	
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan	NA	84,37	NA	NA	
3.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan	70,00	70,00	NA	NA	
		Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitas Anggaran	NA	229	10	NA	
		Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapat Fasilitas Peningkatan Kapasitas	87	87	20*	NA	
		Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	NA	123	1	NA	

		yang Mendapatkan Fasilitasi Pendampingan					
--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil survei kepuasan Masyarakat yang berupa Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 dengan capaian Sangat Baik, namun demikian masih perlu perbaikan pada unsur-unsur yang nilainya belum maksimal, rincian unsur pelayanan dalam indeks kepuasan masyarakat setda sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rincian Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat
Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Unsur	Nilai	Kinerja UPP
1	Persyaratan	90,88	Sangat Baik
2	Prosedur	90,62	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	89,50	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	94,11	Sangat Baik
5	Produk Layanan	90,38	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	90,30	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	90,54	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	90,66	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	94,77	Sangat Baik
	IKM Setda	90,40	Sangat Baik

C. Capaian Keuangan

Realisasi Belanja TA 2024 sebesar Rp. 67.490.246.869,00 dan anggaran sebesar Rp. 73.852.513.800,00 atau mencapai 91,39%. Rincian realisasi per jenis belanja tersaji sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2024

URAIAN JENIS PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN T.A. 2024	REALISASI T.A. 2024	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	38.127.840.000	34.676.870.975	90,95
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.512.282.000	18.754.922.665	91,43
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.338.829.000	18.584.366.487	91,37
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	173.453.000	170.556.178	98,33
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	273.000.000	269.264.000	98,63
Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.000.000	21.535.000	93,63
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	250.000.000	247.729.900	99,09
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.907.470.000	4.826.172.914	81,70
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	207.680.000	190.516.400	91,74
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.842.098.000	1.758.331.500	95,45
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	97.522.000	89.215.000	91,48
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.450.000	24.250.000	95,28
Penyediaan bahan/material	34.720.000	29.812.000	85,86
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3.700.000.000	2.734.047.214	73,89
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.180.950.000	2.126.747.640	97,51

Pengadaan Mebel	94.950.000	92.059.500	96,96
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	426.000.000	406.788.800	95,49
Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	1.660.000.000	1.627.899.340	98,07
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	2.576.263.000	2.328.036.020	90,36
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.703.000	92,58
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.071.000.000	858.211.922	80,13
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.603.000	105.147.235	99,57
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.395.660.000	1.360.973.863	97,51
Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.277.716.000	3.144.745.460	95,94
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	1.220.676.000	1.156.083.260	94,71
Pemeliharaan Mebel	24.720.000	24.000.000	97,09
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.720.000	24.621.800	99,60
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.007.600.000	1.940.040.400	96,63
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.237.194.000	1.106.496.010	89,44
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	302.394.000	175.662.510	58,09
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	295.000.000	293.133.500	99,37
Pelaksanaan Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.800.000	4.800.000	100

Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	635.000.000	632.900.000	99,67
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.043.701.000	1.027.271.023	98,43
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	819.926.000	810.549.078	98,86
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	223.775.000	216.721.945	96,85
Penataan Organisasi	373.518.000	372.428.649	99,71
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	150.608.000	150.097.053	99,66
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	143.461.000	143.088.153	99,74
Peningkatan Kinerja dan Reformasi	79.449.000	79.243.443	99,74
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	745.746.000	720.785.694	96,65
Fasilitasi Keprotokolan	441.909.000	419.547.586	94,94
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	142.849.000	142.003.108	99,41
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	160.988.000	159.235.000	98,91
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	34.158.774.800	31.446.523.018	92,06
Administrasi Tata Pemerintahan	450.918.800	448.499.339	99,46
Penataan Administrasi Pemerintahan	109.635.000	108.996.525	99,42
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	135.084.800	133.936.812	99,15
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	206.199.000	205.566.002	99,69
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	33.337.644.000	30.521.711.488	91,55
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	31.939.044.000	29.153.073.215	91,27
Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	385.000.000	381.138.000	99,00
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian	1.013.600.000	987.500.273	97,43

Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat			
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	343.182.000	334.626.679	97,51
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	70.082.000	69.435.063	99,08
Fasilitasi Bantuan Hukum	211.444.000	204.263.706	99,60
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	61.656.000	60.927.910	98,82
Fasilitasi Kerjasama Daerah	27.030.000	26.685.512	98,73
Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	27.030.000	26.685.512	98,73
Program Perekonomian dan Pembangunan	1.565.899.000	1.481.852.876	94,63
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	175.480.000	174.831.793	99,63
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	121.880.000	121.581.031	99,75
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	53.600.000	53.250.762	99,35
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	160.453.000	158.197.607	98,59
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	55.875.000	54.773.487	98,03
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	104.578.000	103.424.120	98,90
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	848.321.000	772.483.108	91,06
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	636.130.000	566.955.298	89,13
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	53.958.000	51.467.009	95,38
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	158.233.000	154.060.801	97,36
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	381.645.000	376.340.368	98,61
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan	336.854.000	332.237.609	98,72

Perikanan			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	5.358.000	5.344.360	99,75
Koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan air	39.433.000	38.758.399	98,29
JUMLAH TOTAL	73.852.513.800	67.490.246.869	91,39

D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

Output Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif sudah berjalan optimal. Titik tekan pada aspek koordinasi sudah tercermin dalam tugas fungsi dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima (5) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana terjabarkan dalam Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bagian Pemerintahan
 - a. Belum optimalnya capaian Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. Kurangnya sosialisasi regulasi kerjasama antar daerah sehingga terjadi tidakoptimalan pelaksanaan kerjasama daerah;
 - c. Perlunya dilakukan susur batas daerah dalam rangka pembenahan batas antara Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten sekitar;
2. Bagian Protokol dan Kominikasi Pimpinan
 - a. Belum semua kegiatan Bupati dan Wakil Bupati terfasilitasi terutama kegiatan di Luar Kota;
 - b. Kurang lengkap/belum optimalnya bahan-bahan sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati yang diberikan oleh OPD, sehingga berakibat pada belum optimalnya kualitas materi sambutan;
 - c. Kurangnya pengetahuan PNS yang menangani keprotokolan di setiap unit kerja/Desa dan Kelurahan, yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan Pimpinan;
 - d. Belum optimalnya sarana, prasarana dan prasarana dokumentasi.
3. Bagian Hukum

- a. Masih terdapat rancangan Produk Hukum Daerah yang belum sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - b. Analisis dan evaluasi produk hukum daerah belum optimal;
 - c. Pemahaman ASN terkait tahapan pembentukan produk hukum daerah yang masih belum optimal;
 - d. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum merata di Kabupaten Kebumen;
 - e. Penyusunan data laporan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang bersumber dari perangkat daerah belum bisa dilaksanakan secara optimal baik dari jangka waktu maupun substansinya;
 - f. Pelaksanaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah belum optimal.
4. Bagian Perekonomian dan SDA
- a. Belum optimalnya implementasi GCG dalam pengelolaan BUMD dan tata kelola BLUD;
 - b. Belum optimalnya koordinasi langkah-langkah kebijakan pengendalian inflasi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan;
 - c. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan SDA dan energi.
5. Bagian Administrasi Pembangunan
- a. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi kegiatan/pembangunan.
 - b. Pelaporan yang disampaikan OPD tidak tepat waktu dan kurang lengkap.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- a. Perlunya peningkatan sinergitas komunikasi ulama dan umaro secara intern dan antar umat beragama untuk mengantisipasi potensi konflik;
 - b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tentang hibah dan bansos;
 - c. Perlunya peningkatan kesejahteraan guru madin dan TPQ secara menyeluruh;
 - d. Belum akuratnya data tempat ibadah, lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren;
 - e. Masih kurangnya dukungan Sekretariat UKS tingkat kecamatan dalam mendukung pembinaan lomba sekolah sehat;
 - f. Kurangnya pembinaan dan fasilitas terhadap lansia;
 - g. Perlunya fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan;
 - h. Perlunya fasilitasi kegiatan KKN bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kabupaten Kebumen;
 - i. Perlunya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV bagi pelajar/santri di semua sekolah jenjang SLTP dan SLTA di Kabupaten Kebumen;
 - j. Perlunya fasilitasi penyelenggaraan haji dan MTQ.
7. Bagian Organisasi
- a. Masih perlunya dilakukan analisis penyesuaian terhadap kelembagaan perangkat daerah sehubungan dengan adanya

- regulasi baik yang baru diterbitkan setelah kelembagaan perangkat daerah terbentuk maupun hasil evaluasi kelembagaan dan penilaian kematangan organisasi daerah;
- b. Belum ditetapkan Standar Kompetensi Jabatan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan rotasi, mutasi, dan promosi aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 - c. Belum dilaksanakan Analisis Beban Kerja secara komprehensif terhadap tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sebagai dasar menetapkan jumlah dan kompetensi aparatur yang dibutuhkan pada setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 - d. Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik;
 - e. Belum optimalnya tindak lanjut atas hasil evaluasi/survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - f. Belum terpolanya sistem ketatalaksanaan (*business process*), karena belum semua proses penyelenggaraan tugas ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - g. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten belum meningkat secara signifikan;
 - h. Masih diperlukannya peningkatan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), baik LKjIP Kabupaten maupun LKjIP Perangkat Daerah;
 - i. Belum optimalnya upaya penguatan perangkat kerja yang mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen ;
8. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
- a. Dokumen persiapan pengadaan dari OPD seringkali belum sesuai dengan persyaratan sehingga menghambat proses pengadaan barang/jasa;
 - b. Belum optimalnya ketersediaan tenaga fungsional pengadaan baik sebagai pokja pemilihan maupun sebagai pejabat pengadaan;
 - c. Kurangnya minat ASN untuk menjadi tenaga fungsional pengadaan.
9. Bagian Umum
- a. Belum optimalnya kebersihan di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
 - c. Belum seimbangny dukungan kualitas dan kuantitas SDM dengan tuntutan pelayanan yang dibutuhkan

Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok memberikan pelayanan dan membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Dalam menjalankan tugasnya, tentu terdapat hambatan dan tantangan yang dilaluinya.

Hambatan-hambatan tersebut, yaitu:

1. Masih lemahnya pemahaman tugas dan fungsi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
2. Pola pembinaan aparat yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi dan (terkadang) tumpang tindih tuntutan kinerja dari Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
2. Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang terlalu cepat serta tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.

Selain hambatan dan tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah, terdapat juga peluang dari pihak eksternal Sekretariat Daerah yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, antara lain:

1. Adanya kebijakan *reward/punishment* dalam hal pelaporan kinerja bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program prioritas Pemerintah Pusat.
2. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penggunaan teknologi informasi.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki posisi strategis karena memiliki fungsi pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah; pelaksanaan tugas SKPD; proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; pelaksanaan fungsi hukum dan

perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana,serta protokol dan komunikasi pimpinan; pelayanan administratif dan pembinaan aparatur ASN pada instansi daerah; serta pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas perangkat daerah.

Dari berbagai permasalahan dari masing-masing Bagian dapat disimpulkan Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Koordinasi dan Sinergitas Seluruh Perangkat Daerah dan Stakeholder dalam Mewujudkan *Good Goverment*;
2. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Reformasi Birokrasi dan Capaian Kinerja Penyelenggara Pemerintahan;
3. Revitalisasi dan Optimalisasi Peran Sekretariat Daerah Sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
4. Masih perlunya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terkait Pemahaman dan Implementasi Terhadap Tugas dan Fungsi;
5. Belum optimalnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Pelaksanaan Tugas.

E. Review Terhadap Rancangan Awal RENJA Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumberdaya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Adapun review Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang sudah dientri dalam SIPD RI dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.7
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SEKRETARIAT DAERAH				50.004.409.979					54.600.885.052	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				31.687.647.379	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 Nilai	33.382.031.052	
								Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90,4 Nilai		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bag. Umum			20.577.637.979	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bag. Umum	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan tepat waktu	12 Bulan	21.062.635.652	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang/ bula	20.500.533.179	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang/ Bulan	20.937.085.501	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	77.104.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	125.550.151	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bag. Umum dan Perekonomian dan SDA			164.490.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bag. Umum dan Perekonomian dan SDA	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	175.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	14.490.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	25.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	49 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	10 Orang	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat -an Pen- ting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tugas dan Fungsi		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Tugas dan Fungsi		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	100.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	100.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bag. Umum			1.525.520.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bag. Umum	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.130.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	63.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik		Jumlah Paket Bahan Logistik	4 Paket	780.000.000	Penyediaan Bahan Logistik		Jumlah Paket Bahan Logistik	4 Paket	950.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kantor		Kantor yang Disediakan			Kantor		Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	40.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	35.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	21.420.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	35.000.000	
	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi	120 Laporan	598.500.000	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi	120 Laporan	950.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat -an Pen- ting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			SKPD					SKPD			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	20.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bag. Umum			2.758.172.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bag. Umum	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Paket	2.600.000.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	100.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	458.172.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	300.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0 Unit	2.200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	4 Unit	2.200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bag. Umum			1.901.330.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bag. Umum	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	2.368.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.040.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	840.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.250.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan	12 Laporan	36.290.400	Penyediaan Jasa Peralatan dan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan	12 Laporan	60.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perlengkapan Kantor		dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Perlengkapan Kantor		dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.290.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1050.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bag. Umum			1.433.590.8000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bag. Umum	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	126 Unit	1.570.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	109 Unit	593.460.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	109 Unit	900.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat -an Pen- ting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Perizinannya			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Perizinannya			
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	19.669.200	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	100.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	40.773.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	70.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	7 Unit	779.688.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	7 Unit	500.000.000	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum			1.605.435.400	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Umum	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	12 Bulan	1.596.395.400	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah Orang yang Menerima	2 Orang/ Bulan	664.395.400	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah Orang yang Menerima	2 Orang/ Bulan	664.395.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Gaji dan Tunjang an Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Gaji dan Tunjang an Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	210.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	5.040.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	6.000.000	
	Penyediaan Dana Penunjang		Jumlah Orang yang Menerima Dana	7 Orang/ Bulan	726.000.000	Penyediaan Dana Penunjang		Jumlah Orang yang Menerima Dana	7 Orang/ Bulan	726.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat -an Pen- ting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	Fasilitasi Kerumahtangg aan	Bag. Umum			925.000.000	Fasilitasi Kerumahtangg aan	Bag. Umum	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi kerumahtangga an Sekretariat Daerah	12 Bulan	900.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	726.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	650.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	199.500.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	250.000.000	
	Penataan	Bag.			350.970.000	Penataan	Bag.	Jumlah	3	355.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Organisasi	Organisasi				Organisasi	Organisasi	dokumen fasilitasi penataan organisasi	Dokumen		
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengeleolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	63.000.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengeleolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	80.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	238.200.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	200.000.000	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	49.770.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	75.000.000	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi	Bag. Prokopim			445.000.000	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi	Bag. Prokopim	Jumlah laporan hasil fasilitasi	8 Layanan	625.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pimpinan					Pimpinan		keprotokolan			
	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	0 Laporan	246.000.000	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	3 Laporan	370.000.000	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	0 Laporan	102.000.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan	140.000.000	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	0 Laporan	97.000.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3 Laporan	115.000.000	
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)		17.006.991.800	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Indeks Kualitas Kebijakan	70,00 Indeks	19.675.000.000	
								Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Anggaran	229 Lembaga		
								Jumlah Pesantren dan Pendidikan	87 Lembaga		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas			
								Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapatkan fasilitasi pendampingan	123 Lembaga		
	Administrasi Tata Pemerintahan	Bag. Pemerintahan			251.407.200	Administrasi Tata Pemerintahan	Bag. Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang disusun tepat waktu	5 Dokumen	410.000.000	
	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	1 Dokumen	43.747.200	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	1 Dokumen	80.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemerintahan					Pemerintahan			
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	43.372.200	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	80.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	164.287.800	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	250.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Kesra			16.422.545.000	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Kesra	Capaian fasilitasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang sesuai ketentuan	16 Dokumen	18.700.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	5 Dokumen	15.729.545.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	5 Dokumen	17.550.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Spiritual					Spiritual			
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	7 Dokumen	303.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	7 Dokumen	400.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengendalian Penduduk dan KB					Pengendalian Penduduk dan KB			
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	390.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	750.000.000	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bag. Hukum			300.216.000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bag. Hukum	Presentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum	83,33 Persen	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen	60.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen	100.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	180.216.000	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	300.000.000	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	626 Dokumen	60.000.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	626 Dokumen	100.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Bag. Pemerintahan			32.823.600	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Bag. Pemerintahan	Capaian fasilitasi kerja sama daerah yang disepakati	5 Dokumen	65.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	32.823.600	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	65.000.000	
3.	Program		Indeks Kualitas		1.309.770.800	Program		Indeks Tata	84,37	1.543.854.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perekonomian dan Pembangunan		Kebijakan Pembangunan			Perekonomian dan Pembangunan		Kelola Pengadaan	Nilai		
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Bag. Perekonomian			153.768.000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Bag. Perekonomian	Capaian fasilitasi pelaksanaan kebijakan perekonomian yang sesuai ketentuan	3 Laporan	200.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	90.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	125.000.000	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	63.768.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	75.000.000	
	Pelaksanaan Administrasi	Bag. Adm.			123.262.800	Pelaksanaan Administrasi	Bag. Adm.	Jumlah dokumen	2	230.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan	Pembang unan				Pembangunan	Pembang unan	pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan	Dokumen		
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	35.400.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	80.000.000	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	87.862.800	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	150.000.000	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bag. PBJ			653.970.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bag. PBJ	Capaian kinerja layanan pengadaan	1 Laporan	720.000.000	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan	2 Dokumen	427.800.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan	2 Dokumen	400.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jasa					Jasa			
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	39.690.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	70.000.000	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1300 Orang	186.480.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang	250.000.000	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Bag. Perekonomian dan SDA			378.770.000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Bag. Perekonomian dan SDA	Capaian pelaksanaan pemantauan kebijakan sumber daya alam yang sesuai ketentuan	3 Laporan	393.854.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	1 Dokumen	366.854.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	1 Dokumen	366.854.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat-an Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kalautan, dan Perikanan		Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			Kalautan, dan Perikanan		Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	3.378.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	7.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat -an Pen- ting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	8.538.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	20.000.000	

Anggaran Sekretariat Daerah pada Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp. 54.600.885.052 yang terbagi dalam 1 urusan yaitu unsur pendukung urusan pemerintahan. Bila dilihat dari program yang dilaksanakan Tahun 2026, Setda memiliki 3 program. Dari proporsi anggaran dari ketiga program tersebut anggaran pada program penunjang urusan pemerintah daerah adalah yang terbesar karena didalamnya terdapat anggaran untuk Gaji ASN. Sedangkan pada program pemerintah dan kesejahteraan rakyat terdapat bantuan Hibah dan Bansos.

Hasil Forum OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen antara lain sebagai berikut :

1. Forum perangkat daerah sebagai forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
2. Evaluasi kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 capaian fisik 91,38% dan keuangan 91,38%. Dimana ada beberapa kegiatan yang belum tercapai karena kebijakan.
3. Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Tingkat Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi sudah tercapai, hanya pada tingkat kemiskinan perlu ada strategi dari antar OPD yang harus dilakukan sehingga tingkat kemiskinan tercapai.
4. Pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual terdapat tren dimana Tahun Anggaran 2026 menurun dibandingkan Tahun Anggaran 2025.
5. Target Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 khususnya pada nilai SAKIP sudah cukup baik, hanya saja kedepan untuk ada peningkatan level dan perlunya sinergitas antar OPD sehingga dapat mencapai level tersebut.
6. Indikator Pengentasan Kemiskinan perlu adanya pemecahan bersama menyangkut Sekretariat Daerah selaku koordinator OPD.
7. Saran masukan dari narasumber secara garis besar adalah:
 - a. Perlu adanya pendidikan berpolitik dari Kesbangpol karena masih adanya pemilih yang tidak mencoblos ataupun mencoblos keduanya pada saat Pemilu maupun Pilkada.
 - b. Visi Bupati terkait kemiskinan ditempatkan di nomor 1 (satu) .Visi ini bukan hal yang mudah dan harus diturunkan per tahun 1%. Kabupaten Kebumen akan mengupayakan hal tersebut. Perlu mendatangkan investor untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Kebijakan nasional yang terkait dan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai Tahun 2016, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kewenangan pemerintah daerah terkait urusan perencanaan berubah dari kewenangan urusan wajib menjadi urusan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan tersebut tentu berpengaruh terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam urusan perencanaan. Perubahan yang lebih strategis dan penting untuk diperhatikan dan diantisipasi adalah perubahan tugas pokok dan fungsi serta bentuk kelembagaan Sekretariat Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. 8 (delapan) agenda pembangunan nasional tertuang dalam Asta Cita, di antaranya :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai amanat Undang-Undang tersebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 termasuk didalamnya Rencana Kerja Perangkat Daerah pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2020 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja tersebut merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia.

Selanjutnya visi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaras dengan visi Gubernur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2025-2029, yaitu : ***"Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045"***. Adapun misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdapat pada misi ketiga, yakni ***"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas"***.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah ***"Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah"***. Adapun sasaran yang hendak dicapai yaitu ***"Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil"***. Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dapat menjadi acuan sekaligus pendorong bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen selama periode 2025-2029.

B. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Adapun strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kebumen

Visi	Kebumen Berdaya : Kebumen Beriman – Maju – Sejahtera – Berbudaya	
Misi 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi dan Ngayemi	
Tujuan	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sistem dan Aparatur Pelayanan	1. Meningkatkan pembinaan pelayanan publik
		2. Meningkatkan pemantapan kelembagaan perangkat daerah
		3. Meningkatkan kualitas

	Publik	Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
		4. Meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan
		5. Meningkatkan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD
		6. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan fisik kegiatan
		7. Meningkatkan kualitas pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa

C. **Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen**

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, visi Bupati Kebumen adalah **“Kebumen Berdaya : Kebumen Beriman – Maju – Sejahtera – Berbudaya”**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.
2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.
3. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi dan Ngayemi.
5. Mewujudkan Masyarakat yang Damai, Guyub dan Rukun Atas Dasar Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal.

D. **Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026**

Faktor-faktor yang mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati di Sekretariat Daerah Kebumen adalah :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- c. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan
- d. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim
- e. Peningkatan kondsivitas wilayah dan ketahanan bencana

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen bertujuan memberi gambaran kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun yang direncanakan dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah serta hasil evaluasi dan analisis kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Secara rinci tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah di Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2025 - 2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja dan Meningkatkan fasilitasi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan		Nilai EKPPD	Nilai	3,27	3,28	3,29	3,31	3,32	3,33	3,34	
			Indeks Fasilitasi Kegamaan	Indeks	NA	NA	6,05	6,26	6,28	6,35	6,33	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan daerah	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,52	75	75	78	80	82	83	
			Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,53	0,58	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	

			Capaian Penerapan SPM Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan dan akses	Indeks kualitas kebijakan pembangunan	Indeks	90,34	90,4	90,7	91	92	93	94	
		keuangan daerah	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	NA	3,94	4,08	4,22	4,36	4,49	4,63	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,4	90,77	90,4	90,45	90,5	90,55	90,6	
		Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan	Presentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas	%	NA	NA	6,8	9,11	11,09	13,16	15,42	

			kelembaga an									
		Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas	Presentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas	%	NA	5,44	5,05	4,74	4,32	4,01	3,62	
		Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana dan prasarana	Presentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana	%	NA	NA	13,2 9	15,5 1	17,1 4	18,3 5	18,9 5	

Tabel 3.3
Indikator Program Sekretariat Daerah Tahun 2025 – 2029

NO	Indikator Urusan	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	67,84	70,00	70,00	73,00	73,00	75,00	75,00	
2	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapatkan fasilitasi pendampingan *)	Indeks	NA	NA	123	153	183	213	245	
3	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas	Lembaga	NA	87	87	89	89	91	91	
4	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Anggaran *)	Lembaga	NA	NA	229	291	353	415	477	
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	84,35	Na	84,37	84,39	84,41	84,43	84,45	
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,60	71,70	71,00	72,00	72,51	73,76	75,00	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	90,40	85,50	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	

E. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan yang ada. Program dan kegiatan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2025-2029. Secara garis besar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen di Tahun 2026 mencakup 3 program dengan 18 kegiatan dan 55 sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 3.4
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2026

Nomor	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	1	Administrasi Tata Pemerintahan (Bagian Pemerintahan) 1. Penataan Administrasi Pemerintahan 2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
	2	Fasilitasi Kerjasama Daerah (Bagian Pemerintahan) 4. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
	3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Bagian Hukum) 5. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 6. Fasilitasi Bantuan Hukum 7. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
	4	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra) 8. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 9. Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 10. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
	5	Administrasi Pembangunan (Bagian Adminsitasi Pembangunan) 11. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 12. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	6	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (Bagian Perekonomian dan SDA) 13. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 14. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
	7	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (Bagian Perekonomian dan SDA) 15. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 16. Koordinasii, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 17. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Nomor	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
	8	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) 18. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 19. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 20. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bagian Umum) 21. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bagian Umum dan Bagian Perekonomian dan SDA) 23. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 24. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
	11	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bagian Umum) 26. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 29. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 30. Penyediaan Bahan/Material 31. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 32. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	12	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bagian Umum) 33. Pengadaan Mebel 34. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bagian Umum) 36. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 37. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 39. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bagian Umum) 40. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Nomor	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
		lapangan 41. Pemeliharaan Mebel 42. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	15	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum) 44. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 45. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 46. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 47. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	16	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Bagian Umum) 48. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 49. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
	17	Penataan Organisasi (Bagian Organisasi) 50. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 51. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 52. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
	18	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan) 53. Fasilitasi Keprotokolan 54. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 55. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya mengampu misi keempat yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Untuk mewujudkan misi tersebut maka dituangkan dalam suatu Rencana Kerja. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2026 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dan pihak terkait yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya.

Selain berisi program dan kegiatan, Rencana Kerja juga berisi pendanaan yang diterjemahkan dalam pagu indikatif. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

A. Prioritas Sekretariat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, maka Sekretariat Daerah mempunyai beberapa program kegiatan meliputi :

Tabel 4.1
Program Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2026

No	Program	Indikator Program	Tahun 2026	
			Target	Pagu Indikatif
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Setda	71 Nilai	33.382.031.052
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,4 Nilai	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan	70 Nilai	19.675.000.000
		Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitas Anggaran	229 Pesantren	
		Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitas Peningkatan Kapasitas	87 Pesantren	
		Jumlah Pesantren dan	123	

		Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitas Pendampingan	Pesantren	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan	84,37%	1.543.854.000
	Jumlah			54.600.885.052

B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Program dan Kegiatan Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

NO	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			54.600.885.052
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH			
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,00 Nilai	33.382.031.052
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90,40 Nilai	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan tepat waktu	12 bulan	21.392.752.692
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	161 Orang/bulan	20.937.085.501
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 Dokumen	125.550.151
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	175.000.000
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dokumen	25.000.000
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan	10 Orang	50.000.000

		Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Praturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	300 Orang	100.000.000
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.130.000.000
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	100.000.000
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	950.000.000
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	40.000.000
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	35.000.000
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	4 Paket	35.000.000
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	300 Laporan	950.000.000
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Paket	2.600.000.000

	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	100.000.000
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 Unit	300.000.000
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	30 Unit	2.200.000.000
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	2.368.000.000
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	8.000.000
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	1.250.000.000
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	60.000.000
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	1.594.332.809
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	126 Unit	1.570.000.000
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	113 Unit	900.000.000

	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	20 Unit	100.000.000
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	70.000.000
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	500.000.000
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	12 Bulan	1.596.395.400
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 Orang/bulan	664.395.400
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	2 Paket	200.000.000
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	4 Orang	6.000.000
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	4 Orang/bulan	726.000.000
	4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12 Bulan	900.000.000
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12 Paket	650.000.000
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan	Jumlah paket kebutuhan rumah	12 Paket	250.000.000

		Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	tangga wakil kepala daerah yang disediakan		
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen fasilitasi penataan organisas	3 Dokumen	355.000.000
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	1 Dokumen	80.000.000
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	1 Laporan	200.000.000
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	1 Dokumen	75.000.000
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaian layanan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	8 Layanan	625.000.000
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	3 Laporan	370.000.000
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	2 Laporan	140.000.000
	4.01.01.2.14.003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	3 Laporan	115.000.000
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kualitas Kebijakan	70,00 Indeks	19.675.000.000
			Jumlah Pesantren dan Pendidikan Kegamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Anggaran	229 Lembaga	
			Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas	87 Lembaga	

			Jumlah Pesantren dan Pendidikan Kegamaan yang Mendapatkan Fasilitas Pendampingan	123 Lembaga	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang disusun tepat waktu	5 Dokumen	410.000.000
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	1 Dokumen	80.000.000
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	2 Dokumen	80.000.000
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	2 Dokumen	250.000.000
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian fasilitasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang sesuai ketentuan	16 Dokumen	18.700.000.000
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	5 Dokumen	17.550.000.000
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB	7 Dokumen	400.000.000
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan,	Jumlah dokumen hasil	4 Dokumen	750.000.000

		Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas		
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum	83,33 Persen	500.000.000
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	550 Dokumen	100.000.000
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	12 Kasus	300.000.000
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	626 Dokumen	100.000.000
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Capaian fasilitas kerja sama daerah yang disepakati	5 Dokumen	65.000.000
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	5 Dokumen	65.000.000
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan	84,37 Indeks	1.543.854.000
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian fasilitasi pelaksanaan kebijakan perekonomian yang sesuai ketentuan	3 Laporan	200.000.000
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi	2 Dokumen	125.000.000

		BUMD dan BLUD	kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD		
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	1 Laporan	75.000.000
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan	2 Dokumen	230.000.000
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	12 Laporan	80.000.000
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	12 Laporan	150.000.000
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian kinerja layanan pengadaan	1 Laporan	720.000.000
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	2 Dokumen	400.000.000
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	4 Dokumen	70.000.000
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	200 Orang	250.000.000
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Capaian pelaksanaan pemantauan kebijakan sumber daya alam yang sesuai ketentuan	3 Laporan	393.854.000
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi	Jumlah dokumen hasil	1 Dokumen	366.854.000

		dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja		
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian	1 Dokumen	7.000.000
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan	1 Dokumen	20.000.000

BAB V
PENUTUP

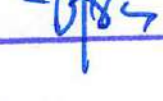
Perencanaan yang baik dan terukur adalah kunci sukses dan keberhasilan dalam implementasi program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan, dalam arti bahwa kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan pencapaian target dan capaian kinerja. Hal ini didukung oleh dokumen perencanaan ini ditaati/dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) melalui komitmen, konsistensi dan pengawalan yang tinggi serta dokumen ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan proses-proses pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya. Selain itu, sikap, mental, semangat, kejujuran, dan disiplin seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) tetap harus dikedepankan.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan tetap memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Kebumen dan Renstra Sekretariat Daerah.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan harus melalui proses musyawarah antarpelaku pembangunan melalui tahapan Forum Perangkat Daerah agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor. Dokumen ini merupakan hasil dari proses perencanaan yang salah satunya adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah, baik dalam kerangka regulasi maupun anggaran, diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebumen, 30 Juli 2025

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Yunitor	
Hantari Mahadewi	

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen,

Edi Rianto, S.T., M.T
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 197001101 199803 1 006

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				161 Orang/bulan	20.937.085.501,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		21.576.084.723,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	125.550.151,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		127.950.174,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-		12 Bulan	175.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	79.000.000,00	
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		27.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		52.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				300 Orang	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		12 Bulan	2.130.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	2.140.000.000,00	

[illegible]

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Paket	2.600.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	653.000.000,00	
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		103.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	300.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	2.200.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			12 Bulan	2.368.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	2.425.500.000,00	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		8.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.250.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		1.255.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		62.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.050.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			126 Unit	1.570.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	1.657.000.000,00	
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				109 Unit	900.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		910.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	70.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		72.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	500.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		570.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	-			12 Bulan	1.596.395.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	942.995.400,00	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	664.395.400,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		664.395.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	200.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	6.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				7 Orang/Bulan	726.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		72.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-		12 Bulan	900.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	920.000.000,00	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah													
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	650.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		660.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah													
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	250.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen fasilitasi penataan organisasi	-		3 Dokumen	355.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	400.000.000,00	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan													
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana													
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

1	2				3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi															
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaian layanan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	-			8 Layanan	625.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	644.000.000,00		
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan															
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan					3 Laporan	370.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		375.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan															
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					2 Laporan	140.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		142.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan															
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan					3 Laporan	115.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		127.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
133	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai EKPPD	3,29 Nilai			3,29 Nilai	19.675.000.000,00							3,29 Nilai	8.675.102.000,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan yang disusun tepat waktu	-			5 Dokumen	410.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	416.000.000,00		
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan															

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		82.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		82.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		252.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang sesuai ketentuan	-			16 Dokumen	18.700.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	7.785.000.000,00	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5 Dokumen	17.550.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		7.030.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				7 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4 Dokumen	750.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		755.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-			83,33 Persen	500.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	407.102.000,00	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				550 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		102.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				12 Kasus	300.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		305.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan														
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				626 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		102.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Capaian Fasilitasi kerja sama daerah yang disepakati	-			5 Dokumen	65.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen	-	67.000.000,00	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				5 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		67.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
134	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan	84,37 Nilai			84,37 Nilai	1.543.854.000,00						84,37 Nilai	468.500.000,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang sesuai ketentuan	-			3 Laporan	200.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	BUMD, BLUD, Perangkat Daerah, Masyarakat	-	204.000.000,00	
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	BUMD, BLUD, Perangkat Daerah, Masyarakat		127.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	BUMD, BLUD, Perangkat Daerah, Masyarakat		77.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan	-			2 Dokumen	230.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	235.000.000,00	
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		82.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		153.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

1	2				3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Layanan Pengadaan	-				1 Laporan	720.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0,00	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					2 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik															
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik					4 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					200 Orang	250.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Capaian Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang sesuai ketentuan	-				3 Laporan	393.854.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	29.500.000,00	
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja					1 Dokumen	366.854.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup															

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian					1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air															
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian					1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
						SEKRETARIAT DPRD						61.761.486.469,00							66.060.708.000,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						61.761.486.469,00								66.060.708.000,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						61.761.486.469,00								66.060.708.000,00	
135	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG - URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	41.891.340.454,00						-	44.300.858.000,00		
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	22.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD	-	27.100.000,00		
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD		2.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	4.405.014.454,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	SEKRETARIAT DPRD	-	4.691.521.000,00		
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab.Kebumen MUHAMAD ARIFIN, S.Si., MT.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Maret 2025
Jam : 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Co Working Setda Kab.Kebumen

Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

MENYEPAKATI

- KESATU : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 26 Maret 2025
Pimpinan Sidang
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

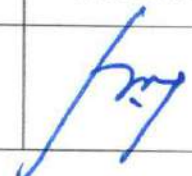

MUHAMAD ARIFIN, S.Si., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680722 199903 1 001

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Setda Kabupaten Kebumen

NO.	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.		DPRD	DPRD Kab.Kebumen	
2.	Yunita Prasetyani, SE.MA.Mec.Dev	Unsur Perangkat Daerah	Bappeda Kab. Kebumen	
3.	Erna Dwi S	Unsur Kecamatan	Kecamatan Kebumen	
4.	Dr. Sulis Riptiono, SE. MM	Unsur Lembaga	Universitas Putra Bangsa	
5.	Firsty Candra N	Unsur Masyarakat/ LSM	KPA Kabupaten Kebumen	

DELEGASI OPD SETDA PADA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025

NO.	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Drs.H.Sabar Irianto	PMI	PMI Cabang Kabupaten Kebumen	



Kebumen, 25 Maret 2025

Nomor : 000.7.2.2 / 938 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Forum Perangkat Daerah dan Forum Renstra Tahun 2025

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen
3. Terlampir
di
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Rabu, 26 Maret 2025
waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
tempat : Ruang Co Working Lantai 1 Setda Kabupaten Kebumen
acara : Forum Renstra Tahun 2025 - 2029 dan Renja Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
keterangan : 1. Kepada Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen untuk menjadi Narasumber;
2. Kepada para Kepala Bagian agar mengikutsertakan 1 (satu) orang PPTK.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kebumen
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
6.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
8.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
9.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kebumen
11.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kebumen
12.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen
13.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kebumen
14.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kebumen
15.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kebumen
16.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kebumen
17.	Kepala Bagian Umum Setda Kebumen
18.	Camat Kebumen
19.	Ketua Forum Anak Kabupaten Kebumen
20.	Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen
21.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen
22.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen
23.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen
24.	Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen
25.	Direktur PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen
26.	Ketua Baznas Kabupaten Kebumen
27.	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen
28.	Ketua Sekretariat Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Kebumen
29.	Rektor Universitas Putra Bangsa Kebumen
30.	Ketua LSM Formasi Kabupaten Kebumen

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL

: Rabu, 26-Maret 2015

ACARA

: Forum. Rencitra & wis-wis dan Ranga 2015 Suka

TEMPAT

: Co Working

NO	NAMA	INSTANSI	PARAF
1.			1.
2.			2.
3.	Kus Haryadi	Itida	3.
4.	Endie Gatmika S.T.	PDAM	4.
5.	Siti Anindita Y.	Bag. PDS	5.
6.	PURNOWAT	Bag. PSDA	6.
7.	Wahyus	Bag. Pamanatelu	7.
8.	Ayus S	Bag. Organisasi	8.
9.	Hans S	BPKAD	9.
10.	Dewi	Prokopim	10.
11.	Harun	Bag. Hlu	11.
12.	Halim Santoso	ATR/BPN	12.
13.	Yusuf K.	PDS	13.
14.	Jabes Hure	PMI	14.
15.	Rustan W	ALPSPM	15.
16.	Legit	B. Pamanatelu	16.
17.	Amin Yahir	BWASLU	17.
18.	Pulung Saktrana Anjo	FA Kebumen	18.
19.	Mesya Putri Dianendra	FA Kebumen	19.
20.	Anugrah Tyas U	Bag. TBJ	20.
21.	Sulistha Panti P	KPSM	21.
22.	Eka Panti J	Ke. Kb	22.
23.	Firsty Candra N	KPA Kebumen	23.
24.	Subraman	KPV Kebumen	24.
25.	TJANJO	Bag. KPSM	25.
26.	Dani N.	Prokopim	26.
27.	Wahyu S	PDAM	27.
28.	Yogo S	Bag. Uj	28.

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL

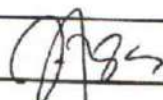
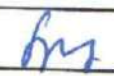
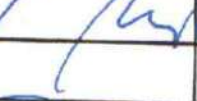
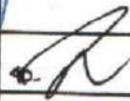
ACARA

TEMPAT

: Rabu, 26-3-2025

: Forum Rastrea Th. 25-29 & Kijang Th. 2026

: K-Co working Lt. 1 Setda. Kabupaten

NO	NAMA	INSTANSI	PARAF
29.	Rini Icharisma	Bug. PSDA	29. 
30.	Xunita P	Bappeda	30. 
31.	Hantari	Bappeda	31. 
32.	Sulis	UPB	32. 
33.	Diana	Bag AP	33. 
34.	Singgar	Bag AP	34. 
35.	Den April	Bug. Hutan	35. 
36.	Erni E	Prokopim	36. 
37.	Destiani Nur A	Bag. Umum	37. 
38.	Pacepres	---	38. 
39.	Tugen	---	39. 
40.	Yuanis	Prokopim	40. 
41.	Luqman F	Bawahan	41. 
42.	Windi K.T	Prokopim	42. 
43.	Rodiyah	Bag. Umum	43. 
44.	Agus Tjahjono	---	44. 
45.	Rahayu H.S	Bagan Umum	45. 
46.	Elly Prastiyanti	---	46. 
47.	Agus Fiyadi	---	47. 
48.	Suyadi	---	48. 
49.	Dwi Astuti	---	49. 
50.	Suryono	---	50. 
51.	Iana	---	51. 
52.	Ngamilin	---	52. 
53.	Pohyani	---	53. 
54.	Dere P. K.	---	54. 
55.	Dwi	---	55. 
56.	Nca	---	56. 

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL

ACARA

TEMPAT[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No. 2 Gedung B Kompleks Setda Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381144, 381410, 381205 Faksimile (0287) 381423,
Laman setda.kebumenkab.go.id Pos-el setda@kebumenkab.go.id

NOTULA

Sidang/Rapat	: Forum Renstra 2025-2029 dan Renja 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
Hari/Tanggal	: Rabu, 26 Maret 2025
Surat Undangan	: Terlampir
Waktu Sidang/Rapat	: Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Acara	: 1. Forum Renstra 2025-2029 dan Renja 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
Pimpinan Sidang/Rapat	
Ketua	: Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kebumen
Pencatat	: Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kebumen
Peserta sidang/rapat	: 1. Para Kabag di lingkungan Setda Kab. Kebumen 2. Para PPTK di lingkungan Setda 3. Komisi A DPRD, Beberapa Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perwakilan Camat, Kepala BPS Kabupaten Kebumen, Kepala BPN ATR, Kepala KPU, Kepala Bawaslu, Pimpinan Perguruan Tinggi Universitas Putra Bangsa, Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen, PDAM Kabupaten Kebumen, PMI Kabupaten Kebumen, KPA Kabupaten Kebumen, Ketua Youth Forum Geopark Kabupaten Kebumen, Ketua Forum Anak Kabupaten Kebumen (sebagaimana daftar hadir terlampir)
Kegiatan Sidang/Rapat	: 1. Pembukaan dan pembacaan tata tertib Forum OPD 2. Menyanyikan Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen 3. Pembacaan doa 4. Laporan penyelenggara oleh Kabag Umum Setda Kab. Kebumen 5. Sambutan Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kab Kebumen Bapak Edi Rianto, ST., MT adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Bahwa fungsi Sekda antara lain :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
 - d. Pengoordinasian proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah
 - e. Pelaksanaan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan protokol
 - f. Pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak tercakup dalam tugas perangkat daerah
 - g. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Paparan oleh Assisten Administrasi Umum Setda antara lain;
- 1) Forum Renstra dan Renja 2026 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yang utama adalah sudah melakukan persiapan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra -PD; Orientasi mengenai Renstra-PD; Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra-PD; dan Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
 - 2) Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2021 s/d 2024 dengan program tujuan Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik serta sasarannya Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - 3) Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat, Tingkat kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi sudah tercapai, hanya pada Tingkat Kemiskinan ini yang perlu ada strategi dari antar OPD yang harus dilakukan sehingga tingkat kemiskinan tercapai.
 - 4) Rencana Kerja Sekretarita Daerah 2026 dapat secara detail bapak/ibu melihat

dalam materi yang telah kita sampaikan.

7. Paparan dari BAPPEDA (sebagai narasumber)
 - 1) Penyusunan Rancangan Awal Renstra-PD ;
Penyusunan rancangan awal Renstra-PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.dan Dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik
 - 2) Penyusunan Rancangan Renstra-PD;
 - ✓ Rancangan Renstra-PD disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra-PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra-PD.
 - ✓ Rancangan Renstra-PD dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
 - ✓ Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara.
 - ✓ Rancangan Renstra_PD disempurnakan berdasarkan Berita Acara Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
8. Paparan dari BPKPD (sebagai narasumber)
 - 1) Pada pagu program Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen khususnya di Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual terdapat tren tahun anggaran 2026 menurun di bandingkan 2025 apakah yang menjadi penyebab
9. Paparan dari Inspektorat (sebagai narasumber)
 - 1) Untuk Target Indikator Kinerja Utama Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 khususnya pada Nilai SAKIP sudah cukup baik, hanya saya kedepan untuk ada peningkatan karena kita harus naik level menjadi BB. Perlunya sinergitas antar OPD sehingga dapat mencapai nilai tersebut.
 - 2) Sedang untuk indekator Pengentasan Kemiskinan perlu adanya pemecahan bersama menyangkut Setda selaku koordinator OPD.
10. Saran dan Masukan :
 - a. KPU Kabupaten Kebumen
Pasca Pemilu di KPU masih ada 2 agenda. Pada pemilihan 2024 untuk anggaran per jiwa adalah Rp. 42.000. Untuk Kebumen di pilkada agak naik interpretasinya yaitu 71% sisanya terdapat suara tidak sah

karena antara lain tidak dicoblos dan dicoblos keduanya. Dari sini perlu adanya pendidikan berpolitik dan ini ada di Kesbang. Harapan KPU dari Pemda mengikuti KPU dalam pendidikan berpolitik. Terkait dengan dana hibah KPU terdapat sisa anggaran yang cukup banyak dan sudah dikembalikan ke Pemda.

Untuk selanjutnya harapan KPU untuk adanya update data kependudukan lebih cepat guna mempermudah untuk pemilihan selanjutnya dan sebagai data perencanaan anggaran Hibah 2029.

b. Bawaslu Kabupaten Kebumen

Perihal fungsi pengawasan di Bawaslu pada pilkada th 2024 sudah terselesaikan dan pada Bulan April Bawaslu masih akan melakukan evaluasi dan laporan kinerja. Secara kelembagaan Bawaslu Kebumen belum menjadi Satker dan gedung yang ditempati dalam perjanjian selesai di Bulan April. Untuk itu dimohon peran Pemda dalam penempatan PNS di Bawaslu dan penyediaan tempat untuk kantor Bawaslu.

Terkait dana hibah untuk pilkada, Bawaslu perlu menghitung untuk SDM Pengawas, dan pengusulan dana cadangan dianggarkan mulai tahun 2027 dan 2028.

c. BPS

Visi Bupati terkait kemiskinan ditempatkan di nomor 1. Visi ini bukan hal yang mudah dan harus diturunkan per tahun 1%. Kebumen akan mampu mengupayakan hal tersebut dengan sarat melakukan harus lebih dari biasanya lebih ekstrim dalam mengupayakannya.

Perlu mendatangkan investor untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan juga kejujuran masyarakat dalam menjawab responden.

Notulis,
Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kebumen, 22

Muhamad Arifin

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 2025**

**1. PEMAPARAN OLEH PIMPINAN SIDANG ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**



2. PEMAPARAN OLEH NARASUMBER





3. PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH





4. DISKUSI





5. PENANDATANGANAN BERITA ACARA



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH

JL. MERDEKA NO. 2 TELP (0287) 381144, 381410, 381205

